LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

(Performance Accountability Report)

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nyalah maka Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Bontang. Selain itu, Pelaporan Kinerja ini juga merupakan alat akuntabilitas keuangan sebagai media evaluasi untuk meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sebagai wujud penerapan anggaran berbasis prestasi kerja (*performance based budgeting*).

Kami berharap Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Bontang, 08 Februari 2021

INSPEKTUR

ENIK RUSWATI, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196810291990032005 4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja (*annual performance report)* merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat akuntabilitas kinerja yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja dalam rangka pertanggungjawaban hasil kinerja perangkat daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 menyatakan bahwa laporan kinerja instansi pemerintah daerah merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menegaskan pula bahwa pelaporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban atas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pelaporan kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 memberikan penjelasan pencapaian kinerja (*performance results*) yang memungkinkan diindentifikasikan sejumlah celah kinerja (*performance gaps*) atas pelaksanaan perjanjian kinerja (*performance agreement*) guna perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemrintah (APIP) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang. Inspektorat Daerah berperan memberikan nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai *(reasonable assurance)* kepada Walikota Bontang bahwa progam dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintahan Kota Bontang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bontang 2016-2021 secara efektif, efesien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peran penting ini telah digambarkan dalam visi Inspektorat Daerah tahun 2016-2021 yakni "APIP yang Berintegritas Sebagai Katalisator Mewujudkan Kepemerintahan Kota Bontang yang Cerdas Ke Arah yang Lebih Baik (*Smart Governance for Better Government*)". Untuk melaksanakan visi tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan misi tahun 2016-2021 adalah "Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bontang yang Taat, Akuntabel dan Efektif (*The Quality Achievements of Three Sustainable Urban Development Programs; Smart City, Green City and Creative City*)". Peta strategis yang disusun menggunakan *balance scored card* yang terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan; perspektif proses internal (*internal business process*); perspektif kelembagaan (*learning and growth*); dan perspektif keuangan (*financial*) sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) dan untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Perjanjian Kinerja (*Performance Agreementl*) Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2020 terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja termasuk 9 (sembilan) indikator knerja utama (IKU). Target kinerja fiskal Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.504.392.695,00 yang operasionalisasinya didukung 8 (delapan) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 98,90% kategori "Sangat Memuaskan".
2. Nilai akuntabilitas kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja yang diukur melalui Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 95,11% kategori "Sangat Tinggi".
3. Nilai akuntabilitas keuangan sasaran strategis Perjanjian Kinerja mencapai 95,71% kategori "sangat Tinggi".
4. Nilai rata-rata efesiensi sumber daya sasaran strategis adalah sebesar 37,62% masih dalam kategori "produktif".

Rincian capaian akuntabilitas kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.	Perspektif Pengguna Layanan (*Stakeholders*)				86,37%	
A.1.	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				97,25%	
A.1.1	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	3	3	100%	
A.1.2.	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	3	3	100%	
A.1.3.	Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	%	87,5	93,29	106%	
A.1.4.	Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	%	85	71	83%	
A.2.	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang				100%	
A.2.1.	Indeks opini BPK atas LKPD	Skor	4 (WTP)	4 (WTP)	100%	
A.3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang				50%	
A.3.1.	Indeks RB Kota Bontang	Skor	B	B	100%	
A.3.2.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	PD	2	0	0	
A.4.	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang				71%	
A.4.1.	Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	%	100	71	71%	
A.5.	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif				100%	
A.5.1.	Persentase kasus pengaduan	%	100	100	100%	

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti					
A.6.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang				100%	
A.6.1.	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	3	3	100%	
B.	Proses Internal (*Internal Business Process*)				98,93%	
B.1.	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang				98,93%	
B.1.1	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	3	100%	
B.1.2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks	3	3	100%	
B.1.3	Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	%	70	72,5	90,63%	
B.1.4	Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	%	≥ 84	88,26	105,07%	
C.	Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)				100%	
C.1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional				100%	
C.1.1	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah *(Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah)*	Skor	Baik	Baik	100%	
C.2.	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan				-	
C.2.1	Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	Level	3	-	-	Belum dapat diukur
C.3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi				100%	
C.3.1	Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	Tahap	80%	80%	100%	
C.3.2	Jumlah utilitas aset kondisi baik	%	100	100	100%	
D.	Keuangan (*Financial*)				109,82%	
D.1	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif				109,82%	
D.1.1	Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	%	100	100	100%	

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
D.2.1	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	%	80	95,71	119,64%	

Walaupun nilai akuntabilitas kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja mencapai 95,71% dengan kategori "Sangat Tinggi", namun capaian indikator kinerja sasaran strategis belum seluruhnya memenuhi ekspektasi. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja diketahui capaian 5 (lima) indikator kinerja telah melebihi ekspetasi (status biru), 12 (duabelas) indikator kinerja telah memenuhi ekspektasi (status hijau) dan 2 (dua) indikator kinerja tidak memenuhi ekspetasi (status merah) serta 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur capaiannya. Indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya karena faktor penetapan kebijakan daerah terkait pelaksanaan kinerja sasaran strategis tersebut.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Insepktorat Daerah untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja.
2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) program terintegrasi secara berkala.
3. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait secara berkala.
4. Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif.
5. Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif.
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko (*risk-based performance management system*).
7. Menguatkan sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal audit management system*).
8. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD) Kota Bontang.
9. Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern secara efektif.
10. Proses bisnis Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi komunikasi yang modern (*business process based on modern information communication technology*).
11. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kepada masyarakat.
12. Mengusulkan pengisian jabatan struktural yang masih lowong.
13. Perbaikan formula perhitungan indikator kinerja yang cukup.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra 2016-2021, Inspektorat Daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang masih signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspekorat Daerah Kota Bontang selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah menetapkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. TUGAS

Tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. FUNGSI

Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawaan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat dan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Perubahan yang signifikan pada struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah berkurangnya jabatan struktural Esselon IV dibawah Sekretaris. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan analisa beban kerja (ABK) bahwa tipe organisasi Perangkat Daerah untuk Inspektorat Daerah adalah **Tipe B,** jabatan struktural Esselon IV dibawah Sekretaris

berjumlah 2 (dua) jabatan, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Bontang sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

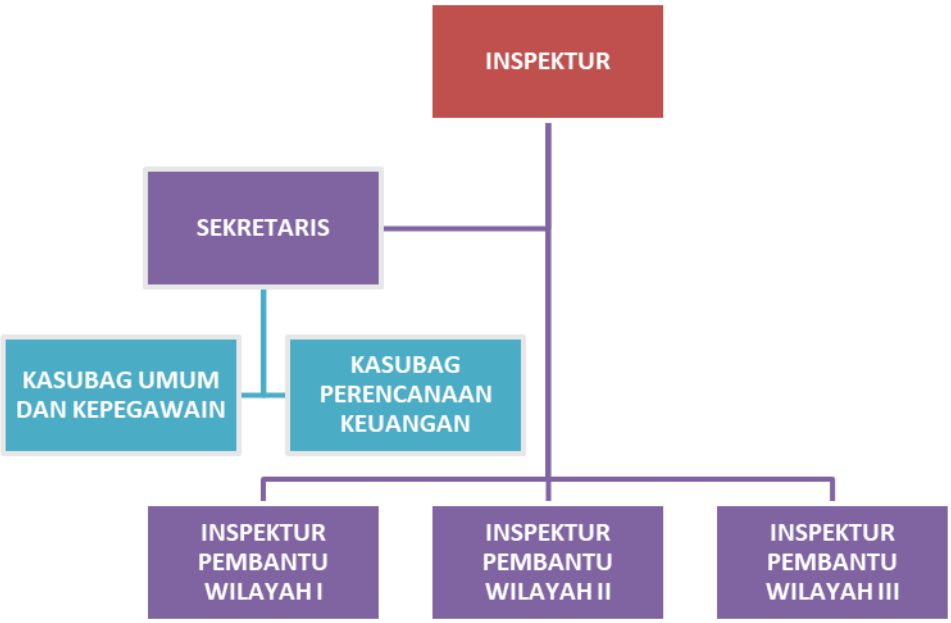

1.4. PROFIL DEMOGRAFI INSPEKTORAT DAERAH

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2020 sebanyak 40 **(empat puluh) orang Pegawai** dengan komposisi sebagai berikut:

Diagram 1.1
Komposisi Berdasarkan Jabatan Pegawai

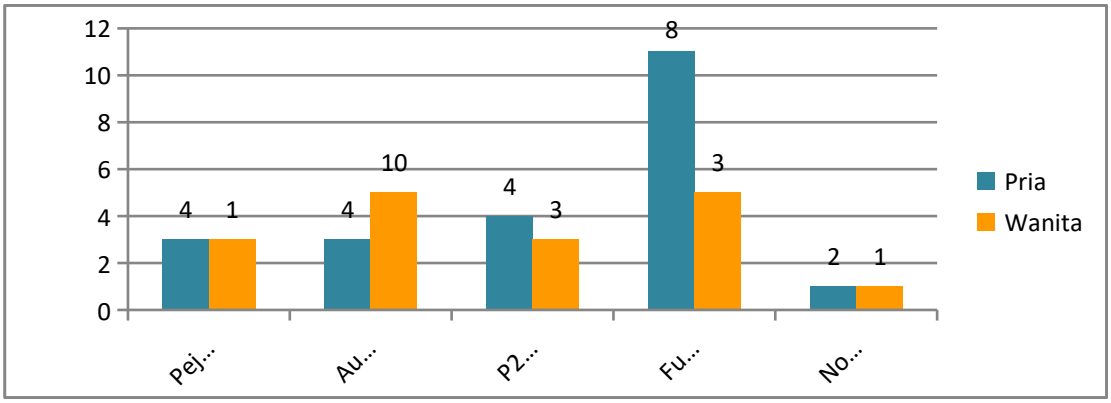

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinsikan pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Adapun peran Inspektorat Daerah adalah memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efesien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Daerah untuk menjamin (*reasonable assurance*) penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efesien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang tidak lagi hanya bertindak sebagai pemeriksa yang berupaya mencari terjadinya kesalahan saja (*watchdog*). Konteks kekinian Inspektorat Daerah lebih banyak berfungsi sebagai katalisator perubahan (*catalyst of change*) dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah sangatlah strategis. Inspektorat Daerah lebih mengutamakan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi daripada melakukan penindakan yang bersifat represif. Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah, efektif, efesien dan terpadu, maka Pemerintah Kota Bontang menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahunnya yang disinergikan dengan kebijakan pengawasan daerah dari pemerintah provinsi Kaltim dan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan bukan hanya memenuhi mandat ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi juga agar terciptanya sistem pengawasan yang terintegrasi secara nasional.

Perwujudan peran efektif Inspekorat Daerah:

1. **Penjamin mutu *(quality assurance)***
2. **Pemberi peringatan dini *(early warning system)***
3. **Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola *(good governance)***

1.6. PENENTUAN ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUE*)

Sasaran pengawasan Inspektorat Daerah meliputi pelaksanaan APBD dan seluruh pegawai serta Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang berada di dalam wilayah administratif Kota Bontang termasuk pelaksanaan APBD Kota Bontang yang berada di luar wilayah administratif Kota Bontang. Beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pengawasan daerah tahun 2020 antara lain:

1. ISU STRATEGIS INTERNAL

Tata kelola APIP Kota Bontang belum mencapai level berintegritas. Hal ini terlihat dari:

a. Metode Pelaksanaan (*Method*)

1) Inspektorat Daerah Kota Bontang belum sepenuhnya menerapkan perencanaan sistem pengawasan intern berbasis manajemen resiko (*risk based management*).
2) Pengelolaan tugas pengawasan intern yang belum sepenuhnya didukung sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan memadai.
3) Pedoman teknis pelaksanaan tugas pengawasan intern belum seluruhnya disusun.
4) Pelaksanaan pengawasan intern belum sepenuhnya mempedomani pedoman kendali mutu.

b. Sumber Daya Manusia (*Man*)

1) Kebijakan SDM pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saat ini masih bersifat parsial belum sepenuhnya mendukung manajemen tugas pengawasan intern di daerah.
   APIP Kota Bontang terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan PNS tertentu. Pembinaan jabatan fungsional Auditor dilakukan oleh BPKP, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan jabatan fungsional P2UPD.
   Pola hubungan kerja antara masing-masing jabatan APIP tersebut masih belum sepenuhnya dapat dilakukan secara terpadu dalam satu tugas pengawasan intern.
2) Inspektorat Daerah belum memiliki kebijakan penyusunan *teamate* pengawasan intern yang memadai berdasarkan *gap competency* dan beban kerja masing-masing tugas pengawasan intern.

c. Keuangan (*Money*)

1) Inspektorat Daerah belum memiliki analisa standar biaya (ASB) kegiatan pengawasan intern yang baku dan belum sepenuhnya menyusun rencana anggaran kas (RAK) yang memadai sebagai tindak pengendalian atas kondisi keuangan daerah yang berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

d. Sarana dan Prasarana (*Machine*)

1) Inspektorat Daerah belum sepenuhnya menerapkan tata kelola arsip yang memadai.
2) Nilai manfaat aset Inspektorat Daerah tahun 2020 sebesar 100% dari nilai perolehan awal dengan utilisasi aset tetap dalam kondisi baik 100%.

2. ISU STRATEGIS EKSTERNAL

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum diimplementasikan sepenuhnya pada Pemerintah Kota Bontang dan Perangkat Daerah.
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bontang belum sepenuhnya berjalan efektif.
c. Pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat dari Perangkat Daerah belum seluruhnya menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bontang.
d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas pada Pemerintah Kota Bontang belum berjalan efektif.

1.7. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Nilai Aset Tetap yang dimiliki Inspektorat Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2020 per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.706.181.948,00.

Tabe 1.1
Komposisi Aset Tetap Inspektorat Daerah Tahun 2020

NO.	INVENTARIS BARANG	NILAI (Rp)
1.	Alat-alat angkutan	1.380.517.000,00
2.	Alat bengkel dan alat ukur	9.550.00,00
3.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.177.709.202,00
4.	Alat-alat studio dan komunikasi	99.041.606,00
5.	Alat-Alat Laboratorium	31.749.000,00
6.	Alat-alat Olah raga	7.615.140,00
	Total	**3.706.181.948,00**

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas dasar pembentukan organisasi, aspek strategis organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kantor.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah dan Penetapan Kinerja tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2018 terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2018. yang memuat capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS (*STRATEGIC PLAN*)

Tema Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tema Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

Berdasarkan alur pikir Rencana Strategis tersebut, maka dirumuskan visi, misi, dan tujuan strategis dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah menggunakan metode *Balance Scored Card*. Penggunaan metode *Balance Scored Card* bertujuan untuk menghasilkan perumusan strategi dari 4 (empat) perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan; perspektif proses internal (*internal business process*); perspektif kelembagaan (*learning and growth*); dan perspektif keuangan (*financial*) sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) dan untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Peta strategis (*Strategy Map*), perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 disajikan pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Peta Strategis (*Strategy Map*) Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

VISI

APIP yang Berintegritas Sebagai Katalisator Mewujudkan Kepemerintahan Kota Bontang yang Cerdas Ke Arah yang Lebih Baik (*Smart Governance Catalyst for Better Government*)

MISI

Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bontang yang Taat, Akuntabel dan Efektif (*The Quality Achievements of Three Sustainable Urban Development Programs; Smart City, Green City and Creative City*)

TUJUAN

1. Meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang *(The Quality of Performance Accountability and Financial Accountability)*
2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi Kota Bontang yang akuntabel, bersih dan efektif (*The Quality of Governance and Bureaucratic Reform*)
3. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Inspektorat Daerah yang berintegritas, profesional dan modern (*The Quality of Internal Audit Capability*)

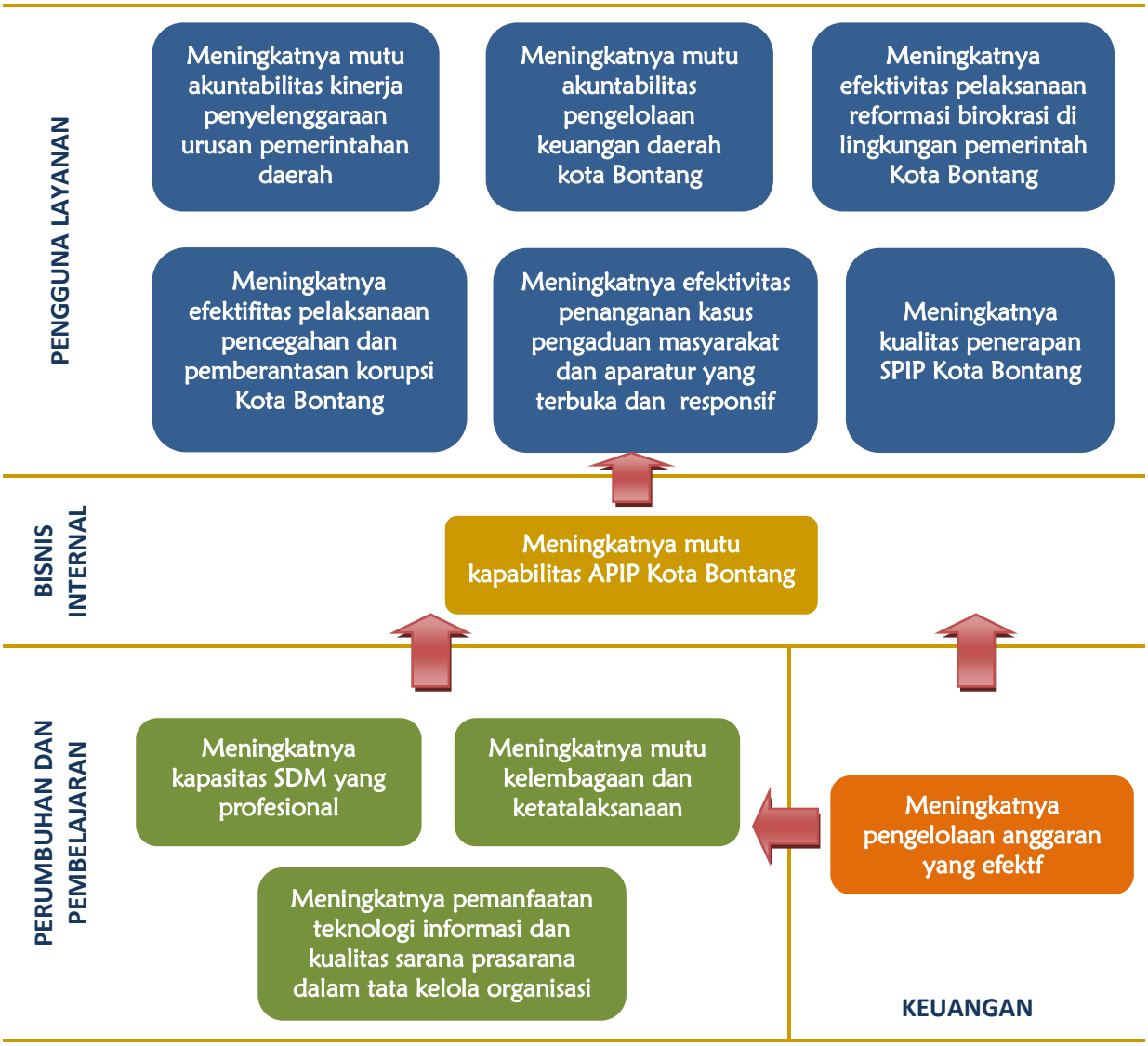

Tabel 2.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DATA DASAR TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
TS.01	a. Persepktif pengguna layanan (*stakeholders*) 40%									
Meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang *(The Quality of Performance Accountability and Financial Accountability)*	**IT.01.01** Nilai evaluasi penyelengaraan urusan pemerintahan daerah Kota Botang dengan predikat "Sangat Tinggi" **IT.01.02** Nilai SAKIP Kota Bontang dengan kategori B ke atas	**SS.01.01** Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	**IKU.01.01.01** Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	N/A	-	2 (Skor C)	3 (Skor B)	3 (Skor B)	3 (Skor B)	3 (Skor B)
			IKU.01.01.02 Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2,5 (Skor CC)	2,5 (Skor CC)	3 (Skor B)	3 (Skor B)	3 (Skor B)	3 (Skor B)	3 (Skor B)
			IKU.01.01.03 Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	71%	75%	80%	82,5%	85%	87,5%	90%
			IKU.01.01.04 Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	N/A	-	70%	75%	80%	85%	100%
	IT.01.03 Opini LKPD Kota Bontang berpredikat WTP	**SS.01.02** Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	**IKU.01.02.01** Indeks opini BPK atas LKPD	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DATA DASAR TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
TS.02 Meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi Kota Bontang yang akuntabel, bersih dan efektif (*The Quality of Governance and Bureaucratic Reform*)	**IT.02.02** Indeks RB Kota Bontang berpredikat "B" **IT.02.01** Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Bontang mencapai nilai 5,9	**SS.02.01** Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang	**IKU.02.01.01** Indeks RB Kota Bontang	C	B	B	B	B	B	B
			IKU.02.01.02 Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	-	-	1 PD	1 PD	2 PD	2 PD	2 PD
		SS.02.02 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	**IK.02.02.01** Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	96,78%	-	100%	100%	100%	100%	100%
		SS.02.03 Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	**IKU.02.03.01** Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	IT.02.03 Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang pada Level 3 (Terdefinisi)	**SS.02.04** Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	**IKU.02.04.01** Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat maturitas SPIP pada level 3	N/A	-	5 PD	10 PD	15 PD	20 PD	29 PD

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DATA DASAR TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
TS.03 Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Inspektorat Daerah yang berintegritas, profesional dan modern (*The Quality of Internal Audit Capability*)	**b. Persepktif Proses Internal (*Internal Business Process*) 30%**									
	IT.03.01 Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang pada Level 3 (*Integrated*)	**SS.03.01** Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	**IK.03.01.01** Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level 2	Level 2	Level 3 (3 elemen di Level 3)	Level 3 (4 elemen di Level 3)	Level 3 (6 elemen di Level 3)	Level 3 (1 elemen di Level 4)	Level 3 (2 elemen di Level 4)
			IK.03.01.02 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	-	3	3	3	3	3
			IK.03.01.03 Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	N/A	60%	70%	70%	80%	80%	90%
			IK.03.01.04 Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	N/A	≥ 84%	≥ 84%	≥ 84%	≥ 84%	≥ 84%	≥ 84%
	c. Persepktif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*) 20%									
		SS.03.02 Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	**IK.03.02.01** Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah	N/A	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DATA DASAR TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		SS.03.03 Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	**IK.03.03.01** Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	N/A	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
		SS.03.04 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	**IK.03.04.01** Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	N/A	-	Perenc	Implen 40%	Implen 60%	Implen 80%	Implen 100%
			IK.03.04.02 Jumlah utilitas aset kondisi baik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persepktif Keuangan (*Financial*) 10%									
		SS.03.05 Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif	**IK.03.05.01** Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			IK.03.05.02 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	N/A	80%	80%	80%	80%	80%	80%

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*)

Sesuai Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bontang, Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan ditetapkannya Renstra tahun 2016-2021. Penetapan IKU tersebut menggunakan indikator kinerja sasaran yang berperspektif *stakeholders* sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

NO.	SASARAN	IKU
1.	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	a. Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah b. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti c. Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti d. Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	Indeks opini BPK atas LKPD
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang	Indeks RB Kota Bontang
4.	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka responsif	Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti
5.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat maturitas SPIP pada level 3 (Terdefinisi)
6.	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN (ANNUAL *PERFORMANCE PLAN*) TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Inspektorat Daerah yang menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra bagi pegawai Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tupoksinya. RKT Inspektorat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) Inspektorat Daerah Tahun 2020

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
A.	Perspektif *Stakeholders*						
A.1	SS.01.01 Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	IKU.01.01.01 Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah realisasi pengawasan kinerja rutin	31 OPD
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelasksanaan Kebijakan KDH	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan fasilitasi Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan	12 laporan
		IKU.01.01.02 Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah penyelesaian LHE SAKIP OPD	31 LHE
		IKU.01.01.03 Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	87,5%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah penyelesaian monitoring penyeleaian TLRHP BPK RI	2 Laporan monitoring penyelesaian TLRHP BPK
		IKU.01.01.04 Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	85%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah penyelesaian monitoring penyeleaian TLHP PKPT	2 Laporan monitoring penyelesaian TLHP PKPT

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
A.2	**SS.01.02** Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	**IKU.01.02.01** Indeks opini BPK atas LKPD	4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelasksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah penyelesaian monitoring kas, persediaan dan aset OPD	31 OPD
A.3	**SS.02.01** Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang	**IKU.02.01.01** Indeks RB Kota Bontang	B	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelasksanaan Kebijakan KDH	Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang *(Non Bugdegting)*	Jumlah penyelesaian laporan PMPRB	1 Laporan hasil PMPRB
		IKU.02.01.02 Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	2 OPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelasksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah penyelesaian laporan penilaian ZI OPD	1 laporan penilaian ZI OPD
A.4	**SS.02.02** Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	**IK.02.02.01** Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	100%	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penerapan RAD PPK terintegrasi	4 laporan
A.5	**SS.02.03** Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	**IKU.02.03.01** Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	5 kasus

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
A.6	**SS.02.04** Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	**IKU.02.04.01** Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	3	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP *(Non Bugdegting)*	Jumlah penyelesaian laporan penilaian maturitas SPIP OPD	27 OPD
B.	**Perspektif *Internal Business Process***						
B.1	**SS.03.01** Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	**IK.03.01.01** Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	3	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah laporan implementasi rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP	1 laporan
		IK.03.01.02 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	3	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah publikasi kegiatan audit intern tahunan	1 event
		IK.03.01.03 Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	80%	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah penyelesaian *peer review* antar Inspektorat kabupaten/kota	1 laporan *Peer Review*
		IK.03.01.04 Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	$\geq$ 84%	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang diselesaikan	4 laporan triwulanan

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
C.	**Perspektif *Learning and Growth***						
C.1	**SS.03.02** Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	**IK.03.02.01** Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah	B	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah JF APIP yang mendapatkan sertifikat penjenjangan dan substansi pengawasan	20 JFAPIP
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang mendapatkan tunjangan kinerja	37 PNS
C.2	**SS.03.03** Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	**IK.03.03.01** Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	3	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah laporan penilaian manajemen risiko Inspektorat	1 laporan
C.3	**SS.03.04** Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	**IK.03.04.01** Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	80%	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah aplikasi internal yang dikembangkan secara mandiri	2 aplikasi
		IK.03.04.02 Jumlah utilitas aset kondisi baik	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bidang yang mendapatkan pelayanan komunikasi	4 bidang
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah penyelesaian pajak dan perijinan kendaraan dinas	23 unit
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan ATK	4 bidang

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan barang cetakan	4 bidang
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bidang yang mendapatkan pelayanan konsumsi kedinasan	4 bidang
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bidang yang mendapatkan pelayanan koordinasi dan konsultasi *stakeholders* terkait	4 bidang
					Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah pemenuhan tenaga administrasi Non PNS	3 orang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat secara rutin	23 unit
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah peralatan kantor pada bidang yang dipelihara rutin	4 bidang
D.	**Perspektif *Financial***						
D.1	**SS.03.05** Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektf	**IK.03.05.01** Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	100%	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah laporan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) pada RKA kegiatan urusan wajib	1 laporan

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
		IK.03.05.02 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	80%	*Non Bugdegting*	*Non Bugdegting*	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah yang diselesaikan	12 laporan

2.4. PERJANJIAN KINERJA (*PERFORMANCE AGREEMENT*) TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Persepktif pengguna layanan (*Stakeholders*)		
1.	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	a. Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	3 (Skor B)
		b. Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3 (Skor B)
		c. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	87,5%
		d. Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	85%
2.	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	Indeks opini BPK atas LKPD	4 (WTP)
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang	a. Indeks RB Kota Bontang	B
		b. Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	2 PD
4.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	100%
5.	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus	Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	selesai ditindaklanjuti	
6.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	3
B.	**Persepktif Proses Internal (*Internal Business Process*)**		
1.	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	a. Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level 3
		b. Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	80%
		c. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	3
		d. Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	$\geq$ 84%
C.	**Persepktif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)**		
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah	Baik
2.	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	Level 3
3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	a. Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	80%
		b. Jumlah utilitas aset kondisi baik	100%
D.	**Persepktif Keuangan (*Financial*)**		
1.	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektf	a. Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	100%
		b. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	80%

2.5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (*FISCAL PERFORMANCE INDICATORS*) TAHUN 2020

Penetapan Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah TA. 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni:

1. Indikator Kinerja Fiskal Awal yang ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Bontang TA. 2020 sesuai PERDA Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kota Bontang TA. 2020.
2. Indikator Kinerja Fiskal Perubahan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kota Bontang TA. 2020 sesuai PERDA Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan TA. 2020.

Rincian Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 menurut Kelompok Belanja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2020

URAIAN	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	TREND (%)
A. Belanja Tidak Langsung	6.544.544.972,00	6.544.544.972,00	23,71
1. Belanja Pegawai	6.544.544.972,00	6.544.544.972,00	0,00
B. Belanja Langsung	1.946.547.723,00	3.959.847.723	103,43
1. Belanja Pegawai	129.240.000,00	129.240.000,00	0,00
2. Belanja Barang dan Jasa	1.629.107.723,00	2.565.392.630,00	57,47
3. Belanja Modal	188.200.000,00	1.265.215.093,00	572,27
Total Belanja (A + B)	**8.491.092.695,00**	**10.504.392.695,00**	**23,71**

Adapun indikator kinerja fiskal perubahan masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Fiskal Perubahan Sasaran Strategis Tahun 2020

NO.	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Perspektif *Stakeholders*	1.462.616.296,00	47,62	
A.1	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	619.418.849,00	20	
A.2	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	93.400.000,00	3,04	
A.3	Meningkatnya efektivitas	35.400.000,00	1,15	

NO.	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang			
A.4	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	113.158.950,00	3,68	
A.5	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	351.823.497.00	11,45	
A.6	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	249.415.000,00	8,12	
B.	**Perspektif *Internal Business Process***	**0,00**	**0,00**	
B.1	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	0,00	0,00	
C.	**Perspektif *Learning and Growth***	**1.608.852.263,00**	**52,38**	
C.1	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	367.160.000,00	11,95	
C.2	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	0,00	0,00	
C.3	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	1.241.692.263,00	40,43	
D.	**Perspektif *Financial***	**0,00**	**0,00**	
D.1	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif	0,00	0,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2019 memperoleh nilai evaluasi sebesar **81,08 (Sangat Baik)**. Beberapa perbaikan yang disarankan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Lebih cermat dan teliti dalam menyajikan informasi kinerja LKIP.
2. Mereviu Indikator Kinerja yang belum tercapai khususnya yang terkait dengan pihak
   eksternal.

Tindak lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah

1. Dalam penyusunan LKIP di tahun berikutnya akan lebih cermat dan teliti dalam menyajikan informasi kinerja.
2. Hasil Reviu Indikator Kinerja yang ditetapkan masih relevan untuk digunakan.

3.2. KERANGKA ANALISA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

CAPAIAN	EKSPEKTASI	STATUS
≤ 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Sesuai Target	
≥ 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan nilai interval sesuai pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	STATUS
1	AA (Sangat Memuaskan)	(> 90 - 100)	
2	A (Memuaskan)	(> 80 - 90)	
3	BB (Sangat Baik)	(> 70 - 80)	
4	B (Baik)	(> 60 - 70)	
5	CC (Cukup)	(> 50 - 60)	
6	C (Kurang)	(> 30 - 50)	
7	D (Sangat Kurang)	(> 0 - 30)	

3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Skor	3	3	100.00	
2	Indeks rata-rata akuntabilitas	Skor	3	3	100.00	

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	kinerja SKPD					
3	Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	%	87,5	93,29	106,62	
4	Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	%	85	71	83,53	
5	Indeks opini BPK atas LKPD	Skor	4	4	100.00	
6	Indeks RB Kota Bontang	Skor	B	B	100.00	
7	Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100.00	
8	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	3	3	100.00	
9	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	3	100.00	
	Capaian rata-rata IKU				**98,90**	

3.4. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Rincian capaian target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2020

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.	**Perspektif Pengguna Layanan (*Stakeholders*)**				**86,37%**	
A.1.	**Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah**				**97,25%**	
A.1.1	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Skor	3	3	100%	
A.1.2.	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	3	3	100%	
A.1.3.	Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	%	87,5	93,29	106%	
A.1.4.	Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	%	85	71	83%	
A.2.	**Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang**				**100%**	
A.2.1.	Indeks opini BPK atas LKPD	Skor	4 (WTP)	4 (WTP)	100%	
A.3.	**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang**				**50%**	
A.3.1.	Indeks RB Kota Bontang	Skor	B	B	100%	
A.3.2.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	PD	2	0	0	
A.4.	**Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang**				**71,00%**	
A.4.1.	Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori “Memuaskan”	%	100	71,00	71,00%	
A.5.	**Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif**				**100%**	
A.5.1.	Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100%	
A.6.	**Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang**				**100%**	

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.6.1.	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	3	3	100%	
B.	**Proses Internal (*Internal Business Process*)**				**98,93%**	
B.1.	**Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang**				**98,93%**	
B.1.1	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	3	100%	
B.1.2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks	3	3	100%	
B.1.3	Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	%	80	72,5	90,63%	
B.1.4	Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	%	≥ 84	88,26	105,07%	
C.	**Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)**				**100%**	
C.1.	**Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional**				**100%**	
C.1.1	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah ***(Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah)***	Skor	Baik	Baik	100%	
C.2.	**Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan**				**-**	
C.2.1	Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	Level	3	-	-	Belum dapat diukur
C.3.	**Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi**				**100%**	
C.3.1	Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	Tahap	80%	80%	100%	
C.3.2	Jumlah utilitas aset kondisi baik	%	100	100	100%	
D.	**Keuangan (*Financial*)**				**109,82%**	
D.1	**Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif**				**109,82%**	
D.1.1	Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	%	100	100	100%	
D.2.1	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	%	80	95,71	119,64%	

Berdasarkan analisa capaian indikator kinerja masing-masing perspektif sasaran strategis tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Daerah tahun 2020 sebesar **95,11%** kategori **Sangat Tinggi** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Daerah Tahun 2020

NO.	PERSPEKTIF	NILAI PERSPEKTIF (NP)	BOBOT (%)	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 x 4*
1.	Pengguna Layanan (*Stakeholders*)	86,37	40	34,54
2.	Proses Internal (*Internal Business Process*)	98,93	30	29,67
3.	Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)	100	20	20
4.	Keuangan (*Financial*)	109,82	10	10,9
	Bobot	**395,12**	**100**	**95,11**

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa nilai rata-rata capaian akuntabilitas kinerja sasaran strategis tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Nilai Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019 - 2020

NO.	URAIAN	2019	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3-4)/4 %*
1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	98,73	95,11	(3,6)%
2	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

3.4.1. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS*

Sasaran strategis perspektif pengguna layanan (*stakeholders*) terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Akuntabilitas Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Perspektif *Stakeholders*

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
A.1.	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	97,25
A.2.	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang	100
A.3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan	50

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
	pemerintah Kota Bontang	
A.4.	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	71
A.5.	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	100
A.6.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	100
	Nilai Perspektif *Stakeholders*	**86,37**

Penjelasan evaluasi capaian masing-masing sasaran strategis berperspektif *stakeholders* adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS A.1.

Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH** yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pencapaian sasaran strategis A.1 diukur dari 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.1.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.1.1.	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Skor	3	3	100%	
A.1.2.	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	3	3	100%	
A.1.3.	Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	%	87,5	93,29	106%	
A.1.4.	Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	%	85	71	83%	
	Nilai Sasaran Strategis				**97,25%**	

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis A.1. tersebut adalah sebagai berikut:

A.1.1. Indeks Rata-Rata Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Indeks Rata-Rata Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dipergunakan mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang.

Indikator kinerja tersebut termasuk pengembangan indikator kinerja sebelumnya dalam Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016. Formula perhitungannya adalah hasil evaluasi atas laporan hasil pengawasan (LHP) melalui pembobotan nilai dari aspek pengawasan Perangkat Daerah yang dilakukan. Komponen yang dinilai terdiri dari manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta aspek pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi atas laporan hasil pengawasan 31 Perangkat Daerah diketahui bahwa indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang Tahun 2020 mencapai skor 3 kategori B (Baik) atau mencapai target sebesar 100%. Capaian indeks tersebut berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang oleh Perangkat Daerah terkait sebagian telah dilaksanakan sesuai target kinerja yang diperjanjikan.

Tabel 3.11
Kenaikan Realisasi Indikator Kinerja A.1.1 Tahun 2019 - 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	3	3	100%

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja A.1.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	3	3	100%

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja adalah:

1. **Internal**
   a. Urusan pemerintahan daerah Kota Bontang yang menjadi obyek pengawasan intern dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Kota Bontang TA. 2020 sebanyak 22 urusan dari 31 urusan atau 70,96%. Dengan demikian, indeks yang dihasilkan belum mencakup penilaian akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Bontang secara keseluruhan.
   Hal ini disebabkan antara lain adanya peristiwa pandemic covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan kegiatan pengawasan terkendala untuk dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang ditetapkan. Selain itu adanya keterbatasan jumlah APIP dan waktu pelaksanaan pengawasan intern bila dibandingkan jumlah obyek pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Bontang.
   b. Proses kendali mutu terhadap pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Daerah belum seluruhnya memadai.
2. **Eksternal**
   a. Beberapa pelaksanaan kegiatan utama Perangkat Daerah (*core business*) belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efesien.
   b. Penganggaran pada Perangkat Daerah belum seluruhnya konsisten dengan perencanaan kerja dan kinerja yang telah ditetapkan.
   c. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya mentaati peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah sehingga masih terdapat temuan keuangan serta perpajakan dan masih adanya pengadaan barang serta jasa yang belum sesuai ketentuan serta belum didukung bukti yang lengkap dan sah.
   d. Pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Hal ini terlihat dari pembukuan aset Perangkat Daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib.
   e. Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah belum dilaksanakan seluruhnya dengan baik. Hal ini terlihat masih adanya realisasi belanja yang belum sesuai dengan peruntukannya.
   f. Struktur pengendalian intern masih lemah. Hal terlihat dari beberapa Perangkat Daerah belum memiliki sistem dan prosedur (SOP) yang baku untuk kegiatan utama serta pengendalian secara berjenjang belum optimal dilakukan.

Upaya pemecahan masalah yang adalah sebagai berikut:
1. Memuktahirkan pengelolaan kegiatan pengawasan intern berbasis manajemen risiko (*risk based managemenet*) secara berkala.
2. Melakukan penyusunan *teamate* berdasarkan *gap competency* dan karakteristik masing-masing penugasan pengawasan intern.
3. Memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang aplikatif sehingga mudah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
4. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD).

A.1.2. Indeks Rata-Rata Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2019 sebanyak 31 obrik. Hasil evaluasi menunjukkan nilai rata-rata evaluasi SAKIP SKPD sebesar 69,63 atau indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mencapai skor 3 (B). Dengan demikian, realisasi indeks rata-rata hanya mencapai 100% dari target kinerja sebesar indeks 3.

Kenaikan nilai rata-rata evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kenaikan Realisasi Indikator Kinerja A.1.2 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Nilai rata-rata evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	64,56	69,63	7,85%
2.	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3 (B)	3 (B)	100%

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja A.1.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3 (B)	3 (B)	100%

Beberapa **kendala dan permasalahan** dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah antara lain adalah:

1. **Internal**
   a. **Metode**
      1) Evaluator memiliki *personal adjustment* yang berbeda-beda dalam melakukan evaluasi.
      2) Kegiatan evaluasi dan pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (PD) belum dilakukan.
2. **Eksternal**
   a. **Personalia**
      1) Beberapa pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan program belum sepenuhnya memahami penerapan SAKIP.
      2) Adanya perubahan SOTK PD Kota Bontang yang berdampak pada sulitnya pertanggungjawaban SAKIP Perangkat Daerah yang lama.
   b. **Metode**

1) **Perencanaan kinerja**

Beberapa PD belum memilki perencanaan kinerja yang memadai, permasalahan yang dominan adalah penetapan indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang Baik (SMART), dokumen renstra belum memuat indicator tujuan dan target keberhasilan.

2) **Pengukuran kinerja**

a) Sebagian Perangkat Daerah belum memiliki pedoman pengumpulan data kinerja serta pengumpulan data dan pengukuran kinerja.

b) Pencapaian kinerja belum dilakukan monitoring secara berkala dan hasil evaluasinya belum ditindaklanjuti dengan Langkah-langkah nyata, sehingga Rencana Aksi belum dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

c) Pengumpulan data kinerja dan pemantauan capaian target kinerja belum didukung dengan mekanisme yang memadai atau terstruktur berupa SOP yang memuat prosedur pengumpulan data, pencatatan dan pihak yang bertanggungjawab, sumber data yang valid serta informasi kinerja yang didukung fakta yang dipertanggungjawabkan dengan Tindakan kesalahan yang minimal.

3) **Pelaporan kinerja**

a) Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

b) LKIP PD belum disajikan informatif dan baik sesuai ketentuan. LKIP PD belum sepenuhnya memberikan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja yang riil secara memadai.

4) **Evaluasi kinerja**

Beberapa PD belum menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP PD tahun sebelumnya.

c. **Sarana**

Implementasi SAKIP belum sepenuhnya menggunakan aplikasi berbasis *website*

Upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dalam penerapan SAKIP Perangkat Daerah menggunakan aplikasi secara daring (*online*).
2. Melakukan pemantauan atas penyelesaian rekomendasi LHE SAKIP Perangkat Daerah secara berkala.
3. Hasil evaluasi SAKIP menjadi salah satu aspek penilaian dalam pemeriksaan reguler.

A.1.3. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

Indikator kinerja tersebut merupakan pengembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelengaraan pemerintahan daerah pada sub aspek Efektivitas

Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, BPK RI telah menerbitkan 27 LHP pada Pemerintah Kota Bontang. Jumlah temuan sebanyak 356 temuan yang terdiri dari 820 rekomendasi senilai Rp86.644.450.186,26. Hasil rapat pemuktahiran data penyelesaian TLRHP BPK semester II Tahun 2020 tanggal 12 Desember 2020 diketahui Pemerintah Kota Bontang telah selesai menindaklanjuti 765 rekomendasi (93,29%) dengan nilai temuan keuangan daerah sebesar Rp64.712.135.671,74 (74,69%).

Diagram 3.1
Perkembangan Capaian Penyelesaian TLRHP BPK RI Tahun 2019-2020

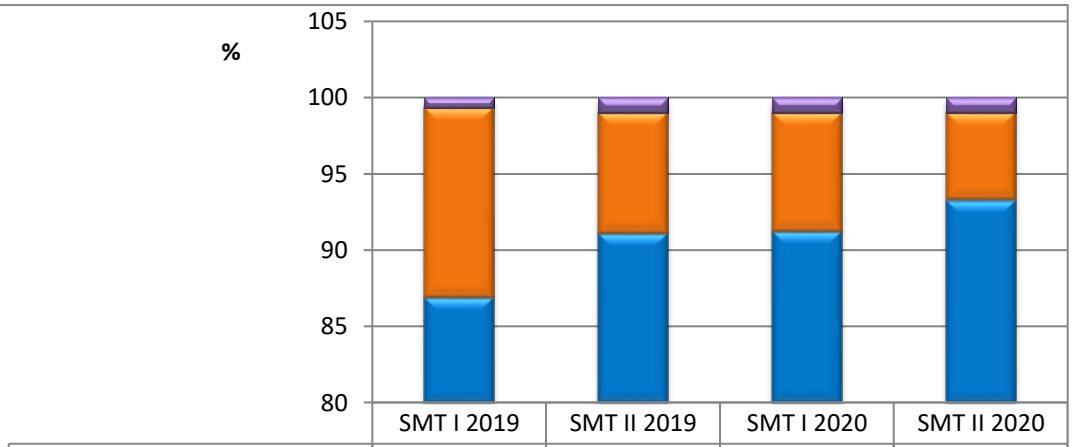

	SMT I 2019	SMT II 2019	SMT I 2020	SMT II 2020
TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TT)	0,65	0,99	0,98	0,98
BELUM DITINDAKLANJUTI (BT)	0	0	0	0
BELUM SESUAI (TB)	12,45	7,92	7,8	5,73
TELAH SELESAI (TS)	86,9	91,08	91,22	93,29

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa perkembangan capaian penyelesaian TLRHP BPK tahun 2019-2020 meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Tabel 3.13
Kenaikan Realisasi Indikator Kinerja A.1.3 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/3*
1.	Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	91,08%	93,29%	2,21%

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja A.1.3 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	93,29%	90%	103,65%

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sistem tata kelola kearsipan Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan memadai, sehingga menyulitkan dalam penelusuran dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan rekomendasi.
b. Beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK RI telah menjadi kasus hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH), sehingga penyelesaian rekomendasi temuan tersebut menunggu penyelesaian proses hukumnya.
c. Beberapa penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang bersifat finansial masih diselesaikan secara bertahap.

Upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemantauan dan monitoring penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara berkala dengan Perangkat Daerah terkait.
b. Meningkatkan peran Majelis TPTGR untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bersifat finansial.

A.1.3. Rasio Temuan APIP yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang

Tabel 3.15
Perkembangan Penyelesaian TLRHP Reguler/Berkala Tahun 2011 s.d. 2020

NO.	TAHUN PEMERIKSAAN REGULER	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI			
			TS	TB	BT	TT
1.	2011	252	209	21	29	0
2.	2012	43	40	3	5	0
3.	2013	208	192	11	79	0
4.	2014	273	212	15	63	0
5.	2015	355	304	3	83	0
6.	2016	255	224	5	141	0
7.	2017	27	20	2	20	0
8.	2018	0	0	0	0	0
9.	2019	282	95	0	78	0
10.	2020	299	105	0	35	0

NO.	TAHUN PEMERIKSAAN REGULER	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI			
			TS	TB	BT	TT
TOTAL		1.994	1401	60	533	0
			71%	3,01%	25,99%	0

Ket : TS = Telah Sesuai TB = Tindak Lanjut Belum Sesuai
BT = Belum Ditindaklanjuti dan Dalam Proses TT = Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Target indikator kinerja "Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti" yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Inspektorat Daerah tahun 2020 adalah sebesar 85%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang diperjanjikan atau hanya tercapai 71%.

Tabel 3.16
Kenaikan Realisasi Indikator Kinerja A.1.4 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/3*
1.	Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	45%	71%	57%

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja A.1.4 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	71%	100%	71%

Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian beberapa laporan hasil pemeriksaan (LHP) masih belum tepat waktu.
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelesaian rekomendasi LHP PKPT Kota Bontang belum berjalan optimal.
c. Beberapa rekomendasi yang bersifat finansial masih diselesaikan secara bertahap oleh Obrik yang bersangkutan.
d. Masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat oleh Obrik yang bersangkutan.
e. Sistem tata kelola kearsipan Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan memadai, sehingga menyulitkan dalam penelusuran dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan rekomendasi.

Upaya pemecahan masalah antara lain:

a. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat pada Obrik terkait secara lebih intensif.

b. Menyusun rencana aksi (*action plan*) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) antara tim pemeriksa dengan Obrik yang bersangkutan sehingga diperoleh kesepakatan bersama untuk menyelesaikan rekomendasi LHP dimaksud.

SASARAN STRATEGIS A.2.

Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang

Indikator kinerja sasaran ini untuk mengukur kinerja Inspektorat Daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang berbasis akrual

Target sasaran strategis tersebut dicapai melalui **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH** yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

Pencapaian sasaran strategis A.2 diukur 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.2

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.2.1.	Indeks opini BPK atas LKPD	Indeks	4 (WTP)	4 (WTP)	100%	
	Nilai Sasaran Strategis				**100%**	

Formula perhitungan capaian sasaran adalah opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Bontang pada periode tahun sebelumnya. Sesuai hasil pemeriksaan keuangan BPK RI, LKPD Kota Bontang tahun 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau mencapai target sebesar indeks 4.

Tabel 3.18
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja A.2 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/3*
1.	Indeks opini BPK atas LKPD	4 (WTP)	4 (WTP)	-

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja A.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Indeks opini BPK atas LKPD	4 (WTP)	4 (WTP)	100%

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja A.2 Tahun 2020 Terhadap Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KOTA BONTANG	TARGET PEMERINTAH PROVINSI KALTIM	TARGET NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Indeks opini BPK atas LKPD	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Kegiatan pendampingan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci BPK RI atas LKPD Kota Bontang berjalan efektif. Hal ini menunjukkan Inspektorat Daerah telah mampu menjadi *counterpart* (mitra) BPK RI untuk meningkatkan kualitas LKPD Kota Bontang.
2. Kegiatan monitoring pencatatan kas, persediaan dan aset Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah berjalan efektif untuk menjamin informasi yang disajikan dalam LKPD Kota Bontang telah diungkapkan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah.
3. Kegiatan asistensi dan rekonsiliasi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) secara berkala.
4. Kegiatan rekonsiliasi pencatatan aset dan persediaan Perangkat Daerah telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) secara berkala.
5. Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan LKPD Kota Bontang berperan aktif menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa **hambatan/permasalahan** yang signifikan dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan keuangan daerah belum seluruhnya interoperabilitas antara pendapatan, belanja dan aset.
2. Pejabat pengelola keuangan Perangkat Daerah belum seluruhnya memahami penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari APBD Kota Bontang maupun diluar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bontang.
4. Pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.
5. Pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya dilakukan secara tertib.
6. Pengelolaan hutang belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai

Upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD) untuk menyempurnakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah serta pemberian

pendidikan dan pelatihan tentang standar akuntansi pemerintah bagi pejabat pengelola keuangan SKPD.

2. Memprioritaskan kegiatan pengawasan intern terhadap Perangkat Daerah yang memiliki anggaran yang besar dan beresiko tinggi terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan.

SASARAN STRATEGIS A.3.

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH** yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

Pencapaian sasaran strategis A.3 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.3

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.3.1.	Indeks RB Kota Bontang	Skor	B	B	100%	
A.3.2.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	PD	2	0	0%	
	Nilai Sasaran Strategis				**50%**	

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis A.3. tersebut adalah sebagai berikut:

A.3.1. Indeks RB Kota Bontang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Formula perhitungan indikator kinerja sasaran adalah hasil evaluasi penilaian mandiri reformasi pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) *online* Kementerian PANRB sebanyak 3 (tiga) tahapan untuk periode tahun berjalan. PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil PMPRB *online* tahap ketiga atau dalam proses penilaian Kementerian PANRB diketahui indeks RB Kota Bontang tahap ketiga tahun penilaian 2020 memperoleh skor berkategori Baik (B) atau telah mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja A.3.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2018	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Indeks RB Kota Bontang	B	B	100%

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja A.3.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/3*
1.	Indeks RB Kota Bontang	B	B	-

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja A.3.1 Tahun 2020 Terhadap Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KOTA BONTANG	TARGET PEMERINTAH PROVINSI KALTIM	TARGET NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Indeks RB Kota Bontang	B	-	B

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Komitmen Walikota Bontang melaksanakan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan *smart governance* pada pemerintah Kota Bontang.
2. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan kebijakan penanganan gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat dan *wishtle blowing system*.
3. Kegiatan pemantauan atas implementasi reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara berkala.

Target kinerja telah tercapai, pencapaian RB tahun 2020 sebesar 66,41% mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 64,72%. **Kendala atau permasalahan** yang dihadapi antara lain adalah:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk. Belum disusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menggambarkan dan memuat sasaran perubahan yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan dan target yang jelas serta terukur.
2. Internalisasi terkait penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bontang belum efektif dan merata kepada seluruh pegawai agar memahami pentingnya penerapan reformasi birokrasi.
3. Belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir kontak antara petugas dan pengguna layanan.
4. Masih ditemukan beberapa produk hukum daerah yang belum harmonis/sinkron dan sesuai kebutuhan stakeholder, sehingga perlu dilakukan pemetaan dan identifikasi terhadap produk hukum daerah secara menyuluruh.
5. Pembangunan zona integritas pada tahun 2019 belum dapat mewujudkan unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Upaya pemecahan masalah adalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang memuat antara lain:

1. Melakukan reviu atas road map Reformasi Birokrasi Kota Bontang untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilan dan targetnya.
2. Secara berjenjang menginternalisasi rencana aksi reformasi birokrasi dan hasil perubahan yang akan diwujudkan di Kota Bontang kepada seluruh pegawai di seluruh Perangkat Daerah agar memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan tatakelola di lingkungan Kota Bontang.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara optimal.
4. Melakukan pemetaan, identifikasi dan pengendalian penyusunan produk hukum daerah secara berkala untuk mewujudkan harmonisasi produk hukum yang efektif, sehingga mengurangi produk hukum daerah yang tidak harmonis.
5. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, system pengawasan dan system integritas di tingkat unit kerja.

A.3.2. Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut mempunyai arti penting karena akan meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah Kota Bontang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Bontang bahwa

penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bontang telah mengalami transformasi ke arah yang lebih baik, telah berorientasi pada pelayanan publik yang cerdas dan praktik KKN dapat dieliminasi sedikit mungkin.

Sesuai Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 228 Tahun 2017 tentang Penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2017 – 2021, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 2 (dua) Perangkat Daerah yang akan dicanangkan menjadi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wlayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM), yakni:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP)

Hasil penilaian kembali ZI menuju WBK/WBBM terhadap Perangkat Daerah pelayanan publik langsung kepada masyarakat termasuk DPMPTSP diketahui bahwa Perangkat Daerah tersebut belum mencapai nilai minimal 75 sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi ZI menuju WBK/WBBM atau capaian 0%.

Hasil penilaian ke-2 Perangkat Daerah yang dicanangkan menjadi ZI menuju WBK/WBBM adalah sebagai berikut:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencapai nilai 43,70.
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) mencapai nilai 69,72.

Indikator kinerja sasaran ini untuk mengukur kinerja Inspektorat Daerah dalam rangka mendorong penerapan sistem integritas Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	0	2 PD	0%

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	0	2 PD	0

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/3*
1.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	0	0	-

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2020 Terhadap Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KOTA BONTANG	TARGET PEMERINTAH PROVINSI KALTIM	TARGET NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	0	Ada	Ada

Kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait belum ditindaklanjuti dengan perincian antara lain:

1. Kepala Perangkat Daerah terkait belum menetapkan agen perubahan dan menjadi *role model* pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait belum melakukan analisa kebutuhan diklat (*training need analysis*) untuk pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
3. Kepala Perangkat Daerah belum menerapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, dan *wishtle blowing system* serta penanganan benturan kepentingan.
4. Standar pelayanan publik belum sepenuhnya diterapkan Perangkat Daerah terkait.
5. Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan pemeriksa eksternal belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

Upaya pemecahan masalah adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait secara berkala.

SASARAN STRATEGIS A.4

Meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang

Pencapaian sasaran strategis A.4 diukur 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.4

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.4.1.	Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	%	100	71	71%	
	Nilai Sasaran Strategis				**71%**	

Dalam rangka penguatan dan mendukung aksi pencegahan dan pencegahan korupsi Kota Bontang, telah diterbitkan pula Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 313 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2017 berfokus pada 6 (enam) permasalahan. Hasil verifikasi dari KPK menunjukkan capaian RAD PPK terintegrasi Kota Bontang rata-rata 71%.

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja A.4 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	71%	100%	71%

Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/3*
1.	Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	86	71	(17,44)%

Kendala atau permasalahan yang signifikan dihadapi untuk melaksanakan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 adalah perubahan unsur-unsur rencana aksi secara total tidak berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga Pemerintah Kota Bontang harus menyusun ulang rencana aksi yang telah ada. Beberapa permasalahan utama antara lain:

1. Pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
2. Manajemen ASN terkait impelementasi penegakan integritas masih rendah
3. Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah belum diadministrasikan secara tertib
4. Management aset yang belum optimal.

Upaya pemecahan masalah adalah:

1. Berkoordinasi denhan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan analisis risiko dan meningkatkan maturitas organisasi ULP.
2. Meningkatkan realisasi *road map* reformasi birokrasi Kota Bontang.
3. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah.
4. Pemenuhan SDM fungsional APIP serta Pemenuhan kecukupan anggaran terhadap mandatory audit.

SASARAN STRATEGIS A.5

Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif

Target indikator kinerja sasaran tersebut merupakan **kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang**, yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja,

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.5

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGE	REALISAS	CAPAIAN	

			T	I		
A.5.1.	Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100%	
	Nilai Sasaran Strategis				**100%**	

Sebagai upaya meningkatkan kepercayaaan masyarakat atas pelayanan publik, Walikota Bontang telah menetapkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat. Pedoman tersebut menetapkan Inspektorat Daerah berkewenangan untuk melakukan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat yang bersifat pengawasan termasuk pelanggaran disiplin aparatur

Selama tahun 2020, Inspektorat Daerah telah menyelesaikan pemeriksaan khusus sebanyak 3 laporan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.33
Rekapitulasi Pemeriksaan Khusus Tahun 2020

NO.	URAIAN	JUMLAH	HASIL
1	Kasus pelanggaran disiplin pegawai	2	Penjatuhan hukuman disiplin
2	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1	Tidak terbukti

Tabel 3.34
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja A.5 Tahun 2018-2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/3*
1.	Jumlah kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	3 kasus	(40)%

Tabel 3.35
Capaian Indikator Kinerja A.5 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Jumlah kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Dukungan yang kuat dari Walikota Bontang untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bontang melalui media pengaduan secara *online* yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya roda kepemerintahan Kota Bontang.

3. Meningkatnya efektifitas penyelesaian tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yang dilakukan Inspektorat Daerah.

Kendala atau permasalahan yang masih dihadapi sama dengan tahun sebelumnya antara lain:
1. Perangkat Daerah belum seluruhnya melakukan pembinaan kedisiplinan pegawai secara efektif.
2. Perangkat Daerah belum seluruhnya melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara efektif.
3. Pelayanan penanganan pengaduan masyarakat oleh Perangkat Daerah secara berjenjang belum sepenuhnya diterapkan sesuai pedoman secara optimal.

Upaya pemecahan masalah antara lain:
1. Melakukan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat secara berkala setiap triwulan.
2. Meningkatkan pembinaan manajemen kepegawaian Perangkat Daerah melalui kegiatan pemeriksaan komprehensif dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

SASARAN STRATEGIS A.6.

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang

Target indikator kinerja sasaran tersebut merupakan **kegiatan Non Budgeting**, yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.6

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.5.1.	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Skor	3	3	100%	
	Nilai Sasaran Strategis				**100%**	

Indikator kinerja sasaran ini untuk mengukur kinerja Inspektorat Daerah untuk meningkatkan mutu penerapan SPIP pada Pemerintah Kota Bontang

Saat ini, BPKP masih melakukan penilaian maturitas SPIP untuk seluruh Inspektorat se-Indonesia, sehingga pencapaian target kinerja masih menggunakan penilaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kembali Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2017 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor: LABINSPIP-478/PW17/3/2017 tanggal 15 Desember 2017 menyimpulkan nilai maturitas SPIP Kota Bontang sebesar “3,717” atau berada pada level terdefinisi.

Tabel 3.37
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja A.6 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	3	3	100%
2.	Level maturitas SPIP Kota Bontang	Terdefinisi	Terdefinisi	-

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja A.6 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	3	3	100%

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja A.6 Tahun 2020 Terhadap Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KOTA BONTANG	TARGET PEMERINTAH PROVINSI KALTIM	TARGET NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	3	-	3

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah monitoring dan evaluasi penyelenggaran SPIP Kota Bontang oleh Inspektorat Daerah berjalan efektif.

Beberapa **permasalahan** yang mempengaruhi penilaian sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan pokok unit organisasi Perangkat Daerah belum seluruhnya ditetapkan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Kebijakan dan prosedur hanya dikomunikasikan pada sebagian kegiatan pokok unit organisasi Perangkat Daerah.
3. Kegiatan pokok unit organisasi Perangkat Daerah belum seluruhnya dilaksanakan mempedomani kebijakan dan prosedur serta belum mendokumentasikannya secara konsisten.
4. Evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian belum dilaksanakan atas semua kegiatan pokok unit organisasi Perangkat Daerah secara berkala, dan belum mendokumentasikannya dengan memadai.

5. Pemantauan yang berkelanjutan telah dilakukan terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, namun belum didukung dengan dokumentasi yang memadai, dan pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Upaya pemecahan masalah adalah:

1. BPKP menjadi *quality assurance* kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah.
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian kembali maturitas SPIP Kota Bontang dengan melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian dan melakukan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui pemantauan kegiatan pengendalian yang terintegrasi dan otomatis, serta mendokumentasikan evaluasi tersebut dengan baik.

3.4.2. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF *INTERNAL BUSINESS PROCESS*

Tabel 3.40
Capaian Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis Perspektif *Internal Business Process*

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
B.1.	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	98,93%
	Nilai Perspektif *Internal Business Process*	**98,93%**

SASARAN STRATEGIS B.1

Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui **Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah** yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan.

Pencapaian sasaran strategis B.1 diukur 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis B.1

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2019			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
B.1.1	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	3	100%	
B.1.2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks	3	3	100%	

B.1.3	Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	%	80	72,5	90,63%	
B.1.4	Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	%	≥ 84	88,26	105,07%	
	Nilai Sasaran Strategis				**98,93%**	

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

B.1.1. Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang

Sesuai Surat Deputi Kepala BPKP Nomor: SP-2466/D3/04/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Bontang, bahwa kapabilitas Inspektorat Kota Bontang sudah sepenuhnya mencapai Level 3.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan mutu penerapan tata kelola pengawasan intern yang efektif dan efesien

Hasil reviu 6 elemen kapabilitas APIP Kota Bontang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Elemen Peran dan Layanan masih di level 3.
2. Elemen Manajemen Sumber Daya Manusia masih di level 3.
3. Elemen Praktik Profesional masih di level 3.
4. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja telah mencapai level 3.
5. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi telah mencapai level 3.
6. Elemen Struktur Tata Kelola masih di level 3.

Tabel 3.42
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja B.1.1 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	2	3	1

Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja B.1.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	3	3	100%

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja B.1.1 Tahun 2020 Terhadap Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KOTA BONTANG	TARGET PEMERINTAH PROVINSI KALTIM	TARGET NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	3	-	3

Beberapa **permasalahan** yang mempengaruhi penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan jasa konsultansi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Bontang belum memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.
2. Proses pengusulan anggaran APIP belum menjamin tersedianya alokasi sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Upaya pemecahan masalah adalah menindaklanjuti rekomendasi akselerasi peningkatan kapabilitas APIP tersebut antara lain:

1. Menguatkan dukungan dalam pemberdayaan APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.
2. Meningkatkan peran dalam mendorong kehematan, efektivitas, dan efisiensi Pemerintah Kota Bontang.
3. Menyelenggarakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan m enjaga kualitas hasil pengawasannya secara berkelanjutan.

B.1.2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas pelaksanaan sistem pengawasan intern yang memenuhi harapan dan kebutuhan Walikota Bontang dan Perangkat Daerah.

Hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang menunjukkan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Inspektorat Daerah mencapai nilai 85,23% atau 3.

Tabel 3.45
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja B.1.2 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	

1	2	3	4	5 = (4 -3)/4
1.	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	3	3	-

Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja B.1.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (3/4)
1.	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	3	3	100%

Walaupun capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah telah mencapai target, namun masih terdapat **permasalahan** yakni:

1. Belum ada ruangan khusus konsultasi;
2. Tidak mudah untuk berkomunikasi dengan Petugas;
3. Tidak ada jadwal konsultasi yang jelas (baik waktu maupun Tim yang memberikan layanan);
4. Kurang senyum;
5. Kemampuan Petugas tidak merata;
6. Tidak terdapat penjelasan terkait persyaratan;
7. Tidak tersedia wadah atau media untuk mengadu;
8. Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak diinformasikan/ tidak jelas.

Upaya pemecahan masalah adalah menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, diantaranya adalah :

1. Menyediakan tempat (tidak harus ruangan) khusus untuk masyarakat/OPD dapat melakukan konsultasi dengan Pihak Inspektorat;
2. Menyediakan nomor khusus (HP/WhatsApp kantor) agar masyarakat/OPD dapat melakukan komunikasi kapanpun dan dimanapun (sesuai jam kerja);
3. Membuat jadwal beserta tim yang menangani konsultasi per hari;
4. Memberikan pelatihan kepada petugas serta pembinaan internal;
5. Menerapkan budaya kerja senyum, sapa, salam;
6. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mendapatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, coaching-mentoring dan juga share knowledge bagu petugas terutama yang berkaitan dengan pelayanan;
7. Melakukan evaluasi SOP dan mengoptimalkan pelaksanaan SP dan SOP;
8. Membuat kotak pengaduan dan ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pengguna layanan, mempublikasikan nomor kantor untuk kepentingan pengaduan, membuka wadah pengaduan melalui sosial media dan mempublikasikan progress tindak lanjut dari hasil pengaduan;

9. Mempublikasikan standar pelayanan yang berkaitan dengan biaya, agar pengguna layanan semakin puas dalam mendapatkan informasi.

B.1.3. Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas akurasi implementasi sistem tata kelola pengawasan intern. Formula perhitungan realisasi indikator kinerja adalah nilai rata-rata hasil telahaan sejawat (*peer review*) yang dilakukan oleh APIP kab/kota lainnya terhadap APIP Kota Bontang atau *peer review* internal antar Inspektur Pembantu Wilayah.

Tahun 2020, tidak dilakukan telahaan sejawat oleh APIP kab/kota lainnya sehingga masih menggunakan tahun sebelumnya. Sesuai Berita Acara Telahaan Sejawat antara Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Inspektorat Daerah Kota Bontang tanggal 28 September 2018 atas penelahaan kembali laporan hasil telaahan sejawat Inspektorat Kabupaten/Kota atas dokumen audit internal Inspektorat Kota Bontang Nomor Itkab.700/1116/IX/2018 tanggal 26 September 2018, bahwa nilai telaaahn sejawat Inspektorat Kota Bontang sebesar 72,5 % berkategori Baik.

Tabel 3.47
Rekapitulasi Skala Kesesuaian Aktivitas APIP Kota Bontang dengan Standar Audit Hasil *Peer Review* Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	KELOMPOK STANDAR	NILAI RATA-RATA
1	Prinsip-prinsip standar	90,00
2	Standar Umum	76,30
3	Standar Pelaksanaan Audit Intern	63,80
4	Standar komunikasi Audit Intern	60,00
NILAI RATA-RATA GABUNGAN		**72,50**
KATEGORI		**BAIK**

Tabel 3.48
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja B.1.3 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	70,79%	72,50%	2,41%

Tabel 3.49
Capaian Indikator Kinerja B.1.3 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	72,50%	90	80,56%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKPT Kota Bontang berjalan cukup efektif.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa **permasalahan** yang mempengaruhi pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern belum berjalan secara efektif.
2. Kegiatan audit/pemeriksaan berkala yang dilaksanakan belum sepenuhnya menilai efektivitas, efesiensi dan ekonomis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (*performance audit*).
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) Program Kerja Pengawasan (PKPT) oleh Perangkat Daerah terkait masih rendah.

Upaya pemecahan masalah adalah antara lain meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) atas kegiatan pengawasan intern mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemanfaatan melalui penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait.

B.1.4. Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah

Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas pelaksanaan rencana kerja (Renja) yang memenuhi prinsip efektif, efesien dan ekonomis. Formula perhitungan indikator kinerja adalah nilai rerata tertimbang kinerja masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari seluruh kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan realisasi nilai rerata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.50
Realisasi Nilai Rerata Kinerja Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	NILAI RERATA
A.	**Program Administrasi Umum Pemerintahan**		
A.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	96,68
A.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	93,70

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	NILAI RERATA
A.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	95,69
A.4	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP)	1	85,26
A.5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	1	99,50
A.6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aoaratur	1	73,53
A.5	**Nilai total rerata kinerja (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)/4 x koef. 0,3**		**27,22**
B.	**Program Urusan Wajib Prioritas Pembangunan Daerah**		
B.1.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	94,43
B.2.	Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	79,98
B.4	**Nilai total rerata kinerja (B.1 + B.2 + B.3)/3 x koef. 0,7**		**61,04**
	Nilai Rerata Keberhasilan Kegiatan		**88,26**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2020 adalah sebesar 88,26% atau mencapai 105,07% dari target ≥ 84% dengan kategori “Berhasil”.

Tabel 3.51
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja B.1.4 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat	94,82%	88,26%	(6,5%)

Tabel 3.52
Capaian Indikator Kinerja B.1.4 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat	88,26%%	≥ 84%	105,07%

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah adanya penambahan kegiatan selain PKPT
Upaya pemecahan masalah adalah penerapan manajemen risiko melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan renja secara berkala dan merevisi rencana tindak pengendalian (RTP) kegiatan wajib pengawasan intern.

3.4.3. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF *LEARNING AND GROWTH*

Tabel 3.53
Capaian Akuntabilitas Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Perspektif *Learning and Growth*

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
C.1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	100%
C.2.	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	-
C.3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	100%
	Nilai Perspektif *Learning and Growth*	**100%**

SASARAN STRATEGIS C.1

Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui:

1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengawas** yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
2. **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas** yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
3. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** yang operasionalisasinya didukung kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran.

Tabel 3.54
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis C.1

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
C.1.1	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah	Skor	Baik	Baik	100%	
	Nilai Sasaran Strategis				**100%**	

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah yang efektif. Formula perhitungan menggunakan indeks profesionalitas ASN yang dikembangkan Badan Kepegawaian

Negara (BKN). Indikator kinerja tersebut merupakan salah satu kategori indikator kinerja baru yang digunakan dalam Renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-2021.

Perhitungan indeks profesionalias ASN Inspektorat Daerah dilakukan terhadap 7 (tujuh) jabatan struktural menggunakan nilai rerata 4 (empat) kriteria penilaian yang meliputi kompetensi, kompensasi, kinerja dan disiplin.

Hasil perhitungan a indeks profesionalitas ASN Inspektorat Daerah mendapatkan skor 77,19 dengan predikat Baik atau mencapai 100% dari target sebagai berikut:

Tabel 3.55
Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Gap Kompetensi	0,50
2	Gap Kompensasi	0,16
3	Kinerja	75,03
4	Indisipliner	0,00
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah		**77,19**
Predikat		**Baik**

.

Tabel 3.56
Capaian Indikator Kinerja C.1.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah **(Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah)**	Baik	Baik	100%

Tabel 3.57
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja C.1.1 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah **(Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah)**	Baik	Baik	22,78%

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja C.1 Tahun 2020 Terhadap Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KOTA BONTANG	TARGET PEMERINTAH PROVINSI KALTIM	TARGET NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah	77,19	-	86

Faktor yang mempengaruhi hasil perhitungan adalah adanya 1 (satu) jabatan esselon II yakni Inspektur yang masih lowong (pada awal tahun).

Faktor mempengaruhi keberhasilan adalah penerapan kebijakan disiplin pegawai baik.

Walaupun telah mencapai target, namun masih terdapat **permasalahan** yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain adalah:

1. Indeks profesionalitas ASN hanya menilai pejabat struktural saja sebanyak 6 (enam) pegawai tidak mencakup seluruh pegawai.
2. Manajemen SDM Inspektorat Daerah juga seharusnya menilai pengelolaan *teamate* aktifitas pengawasan intern. Namun demikian, formula perhitungan dimaksud belum memiliki panduan yang formal.

Upaya pemecahan masalah antara lain adalah:

1. Mengusulkan pengisian jabatan esselon III yang kosong kepada Walikota Bontang.
2. Melengkapi formula penilaian indeks profesionalitas ASN dimaksud dengan menambahkan unsur penilaian seluruh pegawai dan pengelolaan *teammate* aktifitas pengawasan intern.

SASARAN STRATEGIS C.2

Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan

Target indikator kinerja sasaran tersebut merupakan **kegiatan Non Budgeting**, yang diukur dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis C.2

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
C.2.1	Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	Level	3	-	-	Belum dapat diukur
	Nilai Sasaran Strategis				**-**	

Indikator kinerja tersebut untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas penerapan manajemen risiko pada Inspektorat Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah Kota Bontang belum menetapkan kebijakan daerah terkait

penerapan manajemen risiko sehingga Inspektorat Daerah belum dapat melakukan pengukuran capaian tingkat kematangan manajemen risiko. Walaupun demikian, Inspektorat Daerah telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Upaya pemecahan masalah antara lain adalah berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendorong penetapan kebijakan daerah terkait penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

SASARAN STRATEGIS C.3

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** yang operasionalisasinya didukung kegiatan:
   b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   h. Penyediaan Makanan dan Minuman
   i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   j. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** yang operasionalisasinya didukung kegiatan:
   a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian sasaran strategis C.3 diukur dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.60
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis C.3

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
C.3.1	Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	%	80	80	100%	
C.3.2	Jumlah utilitas aset kondisi baik	%	100	100	100%	
	Nilai Sasaran Strategis				**100%**	

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

C.3.1. Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK

Indikator kinerja "jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK" digunakan untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas penerapan tata laksana berbasis aplikasi.

Pemerintah Kota Bontang menetapkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *e-Government* dan *Masterplan* (*Roadmap*) penyelenggaraan *e-Government*. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah merencanakan pengembangan audit terbantukan komputer (ATB) secara bertahap. Target aplikasi yang dikembangkan sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) aplikasi.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Inspektorat Daerah telah mengembangkan aplikasi untuk menunjang penugasan audit intern secara mandiri sebanyak 4 (empat) aplikasi berbasis *web* yang masih dioperasikan secara *offline* atau luar jaringan (luring) dan 4 (empat) aplikasi tambahan lainnya. Hal ini menunujukkan realisasi sebesar 80% atau tercapai 100%.

Keempat aplikasi dimaksud sebagai berikut:

1. Sistem Arsip Digital, untuk tata kelola arsip hasil audit intern secara digital
2. Sistem Manajemen Risiko, untuk pemetaan risiko yang akan digunakan setelah kebijakan penerapan manajemen risiko Kota Bontang telah disusun.
3. Sistem Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, untuk monitoring penyelesaian TLHP reguler PKPT.
4. Sistem Kapabilitas APIP, untuk monitoring penerapan rencana aksi (*action plan*) peningkatan kapabilitas APIP.
5. Sistem Manajemen Arsip Inspektorat Bontang (Si Manis Bontang), untuk database pembinaan dan pengawasan secara terpusat, lengkap dan aman.
6. Klinik Layanan Informasi dan Konseling Dana Bantuan Operasional Sekolah (Klik Bos),
7. Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kota Bontang (Klik Kontak Bontang), sebagai media berkonsultasi bagi perangkat daerah.
8. Sistem Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bontang, sebagai upaya mempermudah pembuatan rencana pengawasan tahunan hingga laporan akhir serta approval atas dokumen-dokumen yang telah dibuat.

Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja C.3.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Jumlah proses bisinis yang	80%	80%	100%

	telah berbasis TIK			

Tabel 3.62
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja C.3.1 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Jumlah proses bisinis yang telah berbasis TIK	100%	100%	-

Tabel 3.63
Capaian Indikator Kinerja C.3.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Jumlah proses bisinis yang telah berbasis TIK	80%	100%	80%

Walaupun telah mencapai target, namum terdapat **Permasalahan** yang mempengaruhi pencapaian sasaran sama dengan tahun sebelumnya antara lain sarana dan prasarana untuk mengoperasikan aplikasi tersebut belum seluruhnya memenuhi standar yang memadai.

Upaya pemecahan masalah adalah menambah sarana dan prasarana sesuai standar teknologi informasi yang memadai

C.3.2. Jumlah utilitas aset kondisi baik

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah dalam rangka mempertahankan nilai manfaat aset terhadap penyelesaian PKPT. Formula perhitungan indikator kinerja adalah nilai aset kondisi baik yang digunakan terhadap capaian keluaran (*output*).

Jumlah aset Inspektorat Daerah kondisi baik per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.698.566.808,00. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh aset dimaksud telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan intern atau 100%.

Tabel 3.64
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja C.3.2 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	

1	2	3	4	5 = (4 -3)/4
1.	Jumlah utilitas aset kondisi baik	100%	100%	0%

Tabel 3.65
Capaian Indikator Kinerja C.3.2 Tahun 2020 Terhadap Target TahunTerakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Jumlah utilitas aset kondisi baik	100%	100%	100%

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran sama dengan tahun sebelumnya antara lain berkurangnya nilai manfaat aset walaupun kondisi seluruh aset masih baik. Inspektorat Daerah terdapat beberapa penambahan aset baru untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Upaya pemecahan masalah adalah mengoptimalkan kegiatan pemeliharan rutin sarana dan prasarana aparatur.

3.4.4. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF *FINANCIAL*

Tabel 3.66
Capaian Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis Perspektif *Financial*

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
D.1	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif	109,82
	Nilai Perspektif *Financial*	**109,82**

SASARAN STRATEGIS D.1
Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif

Pencapaian sasaran strategis D.1 merupakan **kegiatan Non Budgeting**, yang diukur dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis D.1

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2020			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	

D.1.1	Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	%	100	100	100%	
D.2.1	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	%	80	95,71	119,64%	
	Nilai Sasaran Strategis				**109,64**	

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

D.1.1. Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)

Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah dalam rangka penerapan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran.

Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan utama pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang TA. 2020 melalui program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
2. Kegiatan Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan.
3. Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua kegiatan tersebut telah menggunakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dengan disusunnya *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Dengan demikian, realisasi indikator kinerja "Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)" telah teralisasi 100% sesuai target.

Tabel 3.68
Capaian Indikator Kinerja D.1.1 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*

1.	Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	100%	100%	100%

Tabel 3.69
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja D.1.1 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	100%	100%	-

Tabel 3.70
Capaian Indikator Kinerja D.1.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	100%	100%	100%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain Perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah berjalan efektif.

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) hanya dilakukan pada kegiatan urusan wajib yang memiliki pagu anggaran saja, tidak termasuk kegiatan urusan wajib *non budgeting* sasaran strategis *stakeholders* lainnya.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) belum dilakukan.

Upaya pemecahan masalah adalah Inspektorat Daerah melakukan montoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG.

D.1.2. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah

Indikator kinerja ini dipergunakan mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas kualitas kinerja anggaran secara kuantitatif. Formula perhitungan indikator kinerja diperoleh dari realisasi anggaran, kesesuaian perencanaan anggaran dan capaian *output* belanja.

Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah setelah perubahan tahun 2020 sebesar Rp4.178.574.951,00 terdiri dari 19 DPA. Realisasi anggaran Belanja Langsung per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.922.439.861,00 atau 95,71%. Jumlah DPA yang direvisi sebanyak 11 DPA. Realiasi rata-rata *ouput* belanja sebesar 100%. Hasil perhitungan diperoleh realisasi persentase kinerja pelakanaan anggaran Inspektorat sebesar 95,71% tercapai 119,64%.

Tabel 3.71
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja D.1.2 Tahun 2019-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 -3)/4*
1.	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	93,87%	95,71%	1,84%

Tabel 3.72
Capaian Indikator Kinerja D.1.2 Tahun 2020 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3/4)*
1.	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	95,71%	80%	119,64%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana anggaran Inspektorat Daerah berjalan efektif.

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain adalah pengukuran capaian indikator kinerja tersebut hanya dilakukan pada akhir tahun belum dilakukan setiap triwulan secara periodik sehingga belum menggambarkan kondisi riil kinerja keuangan yang menjadi bahan pengambilan kebijakan manajemen pengawasan intern.

Upaya pemecahan masalah adalah Inspektorat Daerah melakukan pemantauan capaian kinerja pelaksanaan anggaran setiap triwulan.

3.5. EVALUASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN STRATEGIS

Indikator kinerja fiskal perubahan yang ditetapkan pada DPPA Inspektorat Daerah tahun 2020 sebesar Rp10.504.392.695,00 direalisasikan sebesar Rp9.894.985.034,00 atau 94,20% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah TA. 2020

NO.	KELOMPOK BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**6.544.544.972,00**	**6.104.925.365,00**	**93,28**
	a. Belanja Pegawai (Gaji PNS dan Tunjangan)	6.544.544.972,00	6.104.925.365,00	93,28
2.	**Belanja Langsung**	**3.959.847.723,00**	**3.790.059.669,00**	**95,71**
	a. Belanja Pegawai	129.240.000,00	115.600.000,00	89,45
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.565.392.630,00	2.442.923.769,00	95,23
	c. Belanja Modal	1.265.215.093,00	1.231.535.900,00	97,34
	T O T A L	**10.504.392.695,00**	**9.894.985.034,00**	**94,20**

Alokasi belanja Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan SAKIP (*Performance Agreement Expenditure*) adalah Belanja Langsung yang operasionalisasinya terdiri dari 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan.

Rincian alokasi anggaran dan belanja berdasarkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah TA. 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.74
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Daerah TA.2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I.	**Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran**	**1.003.033.744,00**	**951.781.381,00**	**94,89**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.750.000,00	2.882.500,00	60,68
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000,00	446.520,00	59,54
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.050.000,00	11.958.190,00	74,51
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.916.500,00	21.993.340,00	73,52
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.112.200,00	39.069.825,00	88,57
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.240.093,00	469.160.150,00	95,31
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.100.000,00	10.891.500,00	98,12
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.144.764,00	10.140.000,00	99,95
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.319.500,00	26.305.700,00	99,95
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.370.000,00	47.411.500,00	96,03
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan	229.572.687,00	223.666.072,00	97,43

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	Konsultasi Ke Luar Daerah			
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	88.708.000,00	87.856.084,00	99,04
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**772.492.783,00**	**760.792.440,00**	**98,49**
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	496.620.000,00	488.220.000,00	98,31
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	257.012.550,00	255.039.700,00	99,23
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.860.233,00	17.532.740,00	92,96
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**67.080.000,00**	**63.800.000,00**	**95,11**
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	67.080.000,00	63.800.000,00	95,11
IV	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**1.115.922.699,00**	**1.070.287.227,00**	**95,91**
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	748.218.849,00	742.704.645,00	99,26
2	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	113.158.950,00	86.682.800,00	76,60
3	Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	16.744.900,00	16.630.500,00	99,32
4	Penilaian Angka Kredit Fungsional	37.800.000,00	28.800.000,00	76,19
5	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Bantuan Keuangan Provinsi)	200.000.000,00	195.469.282,00	97,73
V.	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**300.080.000,00**	**276.254.929,00**	**92,06**
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	300.080.000,00	276.254.929,00	92,06
VI.	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**100.000.000,00**	**99.330.000,00**	**99,33**
1	Implementasi SIMWASDA	100.000.000,00	99.330.000,00	99,33
VII.	**Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**351.823.497,00**	**342.063.692,00**	**97,23**
1	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	351.823.497,00	342.063.692,00	97,23
VIII	**Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**	**249.415.000,00**	**225.750.000,00**	**90,51**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	Daerah (SPIP)			
1	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	249.415.000,00	225.750.000,00	90,51
		3.959.847.723,00	**3.790.059.669,00**	**95,71**

Tabel 3.75
Target dan Realisasi Belanja Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement Budgeting*) Tahun 2020

NO.	URAIAN SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A.	**Perspektif *Stakeholders***							
A.1	**SS.01.01** Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	**IKU.01.01.01** Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	3	3	100%	619.418.849,00	613.904.645,00	99.26%
		IKU.01.01.02 Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3	3	100%			
		IKU.01.01.03 Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	87,5	93,29	106%			
		IKU.01.01.04 Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	85	71	83%			
A.2	**SS.01.02** Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	**IKU.01.02.01** Indeks opini BPK atas LKPD	4 (WTP)	4 (WTP)	100%	93.400.000,00	93.400.000,00	100%
A.3	**SS.02.01** Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang	**IKU.02.01.01** Indeks RB Kota Bontang	B	B	100%	35.400.000,00	35.400.000	100%

NO.	URAIAN SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		IKU.02.01.02 Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	2 OPD	0	0%			
A.4	**SS.02.02** Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	**IK.02.02.01** Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	100%	71,00%	71,00%	113.158.950,00	86.682.800,00	76.6%
A.5	**SS.02.03** Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	**IKU.02.03.01** Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	351.823.497.00	342.063.692.00	97.23%
A.6	**SS.02.04** Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	**IKU.02.04.01** Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	3	3	100%	249.415.000,00	225.750.000,00	90.51%
B.	**Perspektif *Internal Business Process***							
B.1	**SS.03.01** Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	**IK.03.01.01** Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	3	3	100%			
		IK.03.01.02 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	3	3	100%			
		IK.03.01.03 Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan	80%	72,5%	90,63%			

NO.	URAIAN SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		IK.03.01.04 Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	≥ 84%	88,26%	105,07%			
C.	**Perspektif *Learning and Growth***							
C.1	**SS.03.02** Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	**IK.03.02.01** Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah	B	B	100%	367.160.000,00	340.054.929,00	99,83%
C.2	**SS.03.03** Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	**IK.03.03.01** Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	3	-	-	0,00	0,00	0,00%
C.3	**SS.03.04** Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	**IK.03.04.01** Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	80%	80%	100%	1.241.692.263,00	1.187.461.601,00	96%
		IK.03.04.02 Jumlah utilitas aset kondisi baik	100%	100%	100%	275.872.783,00	272.572.440,00	98.8%
D.	**Perspektif *Financial***							
D.1	**SS.03.05** Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektf	**IK.03.05.01** Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00%
		IK.03.05.02 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	80%	95,71%	119,64%	0,00	0,00	0,00%

Diagram 3.1
Realisasi Belanja Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement Expenditure*)
Tahun 2020

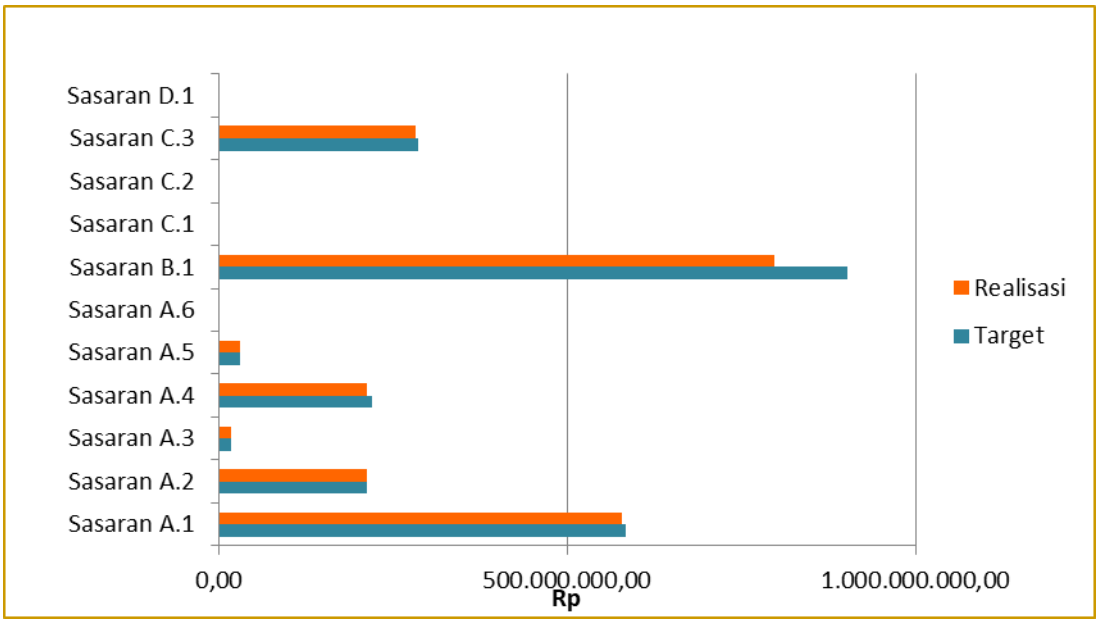

Dari diagram di atas, terlihat bahwa realisasi belanja sasaran strategis C.1 "Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional" mendapatkan porsi tertinggi sebesar 56,20% dari total realisasi belanja Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawas karena akan mempengaruhi mutu hasil pengawasan intern. Beberapa hal yang menyebabkan besarnya porsi anggaran belanja sasaran staregis C.1 bila dibandingkan dengan porsi anggaran belanja sasaran strategis lainnya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi (*enrichment*) pegawai Inspektorat Daerah dilakukan pada lembaga pembina JF APIP dan berkompeten yang berada di luar daerah Kota Bontang sehingga menimbulkan biaya tingggi (*high cost*).
2. Penganggaran belanja tunjangan kinerja tidak tetap (TKTT) ASN Inspektorat Daerah.

Tabel 3.76
Nilai Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	2019	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	***2***	***3***	***4***	***5 = (3-4)/4 %***
1	Realisasi Belanja Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement Budgeting*)	93,45% Tinggi	93,87% (sangat tinggi)	0,42%

Realisasi belanja perjanjian kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,42% apabila dibandingkan tahun 2019. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan** adalah perencanaan anggaran kas optimal.

3.6. EVALUASI EFESIENSI SUMBER DAYA

Evaluasi efesiensi sumber daya merupakan ukuran produktifitas pencapaian sasaran strategis perjanjian kinerja berdasarkan prinsip "*money follows programs*". Penilaian efesiensi sumber daya adalah selisih antara nilai akuntabilitas kinerja dengan capaian keuangan masing-masing sasaran strategis. Kriteria pengukuran efesiensi sumber daya adalah sebagai berikut:

1. Sangat produktif : 101 s.d. 120 (status biru)
2. Produktif : 0 s.d. 100 (status hijau)
3. Tidak produktif : kurang dari 0 (status merah)

Rincian capaian efesiensi sumber daya masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.77
Efesiensi Sumber Daya Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

NO.	SASARAN	NILAI SASARAN STRATEGIS (%)	CAPAAIN KEUANGAN (%)	EFESIENSI SUMBER DAYA(%)	KRITERIA
1	2	3	4	5 = 3- 4	6
A.	**Perspektif *Stakeholders***	**94.70**	**93.93**	**(0,76)**	
A.1	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	97,25	99,26	(2.01)	
A.2	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	100	100	0,00	
A.3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang	100	100	0.00	
A.4	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	71	76.6	(5.60)	
A.5	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	100	97.23	2.77	
A.6	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	100	90.51	9.49	
B.	**Perspektif *Internal Business Process***	**100**	**0**	**100**	
B.1	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	100	0	100	

NO.	SASARAN	NILAI SASARAN STRATEGIS (%)	CAPAAIN KEUANGAN (%)	EFESIENSI SUMBER DAYA(%)	KRITERIA
1	**2**	**3**	**4**	**5 = 3- 4**	**6**
C.	**Perspektif *Learning and Growth***	**100**	**63,34**	**36,66**	
C.1	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	100	92.62	7,38	
C.2	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	-	0,00	-	-
C.3	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	100	97.4	2.6	
D.	**Perspektif *Financial***	**109.82**	**0,00**	**109.82**	
D.1	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektf	109.82	0,00	109.82	
T o t a l (0,4A + 0,3B +0,2C + 0,1D)		**98,86**	**61,23**	**37,62**	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata efesiensi sumber daya sasaran strategis adalah sebesar 37,62% masih dalam kategori produktif. Hasil evaluasi menunjukan sasaran strategis yang berpredikat sangat efesien penggunaan sumber daya sebanyak 1 (satu) sasaran, efesien sebanyak 6 (enam) sasaran dan tidak efesien sebanyak 3 (tiga) sasaran serta 1 (satu) sasaran startegis belum bisa dilakukan pengukuran tingkat efesiensi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2020 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 diperoleh nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 95,11% dengan kategori "Sangat Tinggi". Capaian tersebut didukung anggaran belanja sebesar Rp. 3.959.847.723,00 direalisasikan Rp. 3.790.059.669,00 atau 95,71% dengan kategori "Sangat Tinggi".

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja diketahui capaian 5 (lima) indikator kinerja telah melebihi ekspetasi (status biru), 12 (dua belas) indikator kinerja telah memenuhi ekspektasi (status hijau) dan 2 (dua) indikator kinerja tidak memenuhi ekspetasi (status merah) serta 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur capaiannya. Indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya karena faktor penetapan kebijakan daerah terkait pelaksanaan kinerja sasaran strategis tersebut.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Insepktorat Daerah untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja.
2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) program terintegrasi secara berkala.
3. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait secara berkala.
4. Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif.
5. Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif.
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko (*risk-based performance management system*).
7. Menguatkan sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal audit management system*).
8. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD) Kota Bontang.
9. Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern secara efektif.
10. Proses bisnis Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi komunikasi yang modern (*business process based on modern information communication technology*).

11. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kepada masyarakat.
12. Mengusulkan pengisian jabatan fungsional yang masih kurang.
13. Perbaikan formula perhitungan indikator kinerja yang cukup.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra 2016-2021, Inspektorat Daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang masih signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis.

LKIP Inspektorat Daerah tahun 2020 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan baik dalam aspek format penyajian maupun maupun aspek akuntabiltasnya.

Inspektorat Daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan capaian Sasaran Strategis tahun 2020.